

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, ada pengaruh yang negatif signifikan antara transparansi pengelolaan anggaran terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi. Artinya, meningkatnya transparansi pengelolaan anggaran akan dapat mengurangi tingkat korupsi. Dengan demikian, hipotesis diterima.

Hanya ada 9 dari 19 provinsi dalam penelitian ini yang mematuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.52/1797/SJ dengan menyediakan menu konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah”. Sedangkan untuk kelengkapan dokumen transparansi, hanya 1 dari 19 provinsi dalam penelitian ini yang memenuhi semua ketentuan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.52/1797/SJ. Perda APBD menjadi dokumen anggaran yang paling banyak diunggah. Sebaliknya, LRA SKPD merupakan dokumen anggaran yang paling sedikit diunggah.

#### **5.2 Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pemerintah, yaitu:

1. Pemerintah sebaiknya memperbaiki tampilan laman web resmi masing-masing daerah dan menyediakan menu konten sesuai peraturan perundang-undangan sehingga lebih jelas, lebih rapi, mudah diterima, dan tepat sasaran.

2. Seharusnya diatur sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan transparansi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pemerintah daerah dapat lebih memerhatikan hak masyarakat dengan menyediakan dokumen informasi pengelolaan anggaran yang jelas, terbuka, lengkap, dan tepat waktu kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan anggaran dan turut melaporkan kejanggalan yang terjadi sehingga korupsi dapat dicegah.

### 5.3 Keterbatasan dan Implikasi

#### 5.3.1 Keterbatasan

Karena menggunakan data sekunder, maka penelitian ini sangat bergantung pada data yang diterbitkan lembaga terkait. Sedangkan data yang diterbitkan oleh KPK tidak tersedia untuk seluruh pemerintah daerah sehingga sampel penelitian terbatas.

#### 5.3.2 Implikasi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi seluruh pemerintah untuk lebih meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran daerah masing-masing sehingga diharapkan tingkat korupsi dapat menurun.